



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Keterlibatan Majelis Taklim dalam Politik Elektoral: Antara Pendidikan Politik dan Kepentingan Praktis

*The Involvement of Majelis Taklim in Electoral Politics:
Between Political Education and Practical Interests*

Marsav Rinaldi^{1*}, Sirajudin¹, Marwana¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu

*Author Correspondence: Email: marsavrinaldi@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Aug, 2025

Revised: 15 Sep, 2025

Accepted: 10 Oct, 2025

Kata Kunci:

Majelis Taklim, Politik Elektoral, Pendidikan Politik, Kepentingan Praktis

Keywords:

Majelis Taklim, Electoral Politics, Political Education, Practical Interests

DOI: 10.56338/jks.v8i10.8765

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Majelis Taklim dalam politik elektoral dengan menyoroti dua dimensi utama, yaitu peran pendidikan politik dan kepentingan praktis yang melingkupinya. Majelis Taklim sebagai lembaga keagamaan memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran politik umat melalui kegiatan keagamaan, pengajian, dan pembinaan moral. Namun, keterlibatan mereka dalam politik elektoral sering kali menimbulkan perdebatan antara fungsi dakwah dan potensi politisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa Majelis Taklim yang aktif menjelang pemilihan umum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian Majelis Taklim berperan sebagai agen pendidikan politik yang mendorong partisipasi demokratis secara rasional dan beretika, sementara sebagian lainnya lebih terlibat dalam dukungan praktis terhadap kandidat tertentu. Dengan demikian, keterlibatan Majelis Taklim dalam politik elektoral berada pada spektrum antara pendidikan politik yang mencerahkan dan kepentingan pragmatis yang berorientasi kekuasaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the involvement of Majelis Taklim (Islamic study groups) in electoral politics by highlighting two main dimensions: political education and practical interests. As religious institutions, Majelis Taklim play a strategic role in shaping political awareness among Muslims through religious gatherings, moral guidance, and community education. However, their participation in electoral politics often raises debates between their da'wah function and the risk of politicization. This research employs a qualitative approach using case studies in several Majelis Taklim that were active during election periods. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that some Majelis Taklim function as agents of political education, encouraging rational and ethical democratic participation, while others are more involved in providing practical support to certain candidates. Thus, the involvement of Majelis Taklim in electoral politics exists along a spectrum between enlightening political education and pragmatic interests driven by power orientation.

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, khususnya Islam, Majelis Taklim (selanjutnya MT) merupakan lembaga pembelajaran keagamaan yang menjadi fenomena dan tersebar luas, hingga menjangkau unit-unit lingkungan terkecil seperti rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Hal tersebut disebabkan MT telah mengakar dalam komunitas masyarakat dan menawarkan fleksibilitas dan keterbukaan yang signifikan (Syafar, 2020). Dalam level tertentu, MT dianggap

sebagai solusi dan peluang untuk menambah serta melengkapi pengetahuan keagamaan yang tidak dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas atau kendala waktu. Perkembangan MT yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan bukti akan perannya yang krusial sebagai sarana peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pengetahuan agama di tengah masyarakat.

Pendirian MT didasarkan pada suatu kesadaran kolektif umat Islam akan pentingnya menuntut ilmu agama dalam keseharian yang dilakukan secara terorganisir, teratur dan sistematis (Kemenag RI, 2014). Peran dan fungsi MT, dengan demikian, tidak dapat dilepaskan dari nilai teologis, yakni sebagai pengajaran dan pembinaan masyarakat dengan berpedoman dan berdasar pada ajaran agama Islam (Syafar, 2020). MT juga memberikan gambaran tentang arti penting kehadiran suatu wadah pengembangan serta penguatan spiritual keislaman yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yaitu tentang Majelis Taklim disebutkan bahwa MT bertugas untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam.

Dari aspek sosial, MT berperan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar individu dan antar kelompok, terkhusus antar para ulama dan umara, serta menjadi sarana komunikasi dan interaksi interaksi antara mualim dan masyarakat (Ridwan, 2020). Secara umum, MT berfungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang sifatnya non-formal, serta sebagai lembaga sosial keagamaan yang bersifat fleksibel, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri di lingkup masyarakat. Hingga sekarang ini majelis taklim merupakan salah satu lembaga dakwah yang masih terus eksis dan dianggap sebagai lembaga dakwah yang paling substansial dan dekat dengan kehidupan bermasyarakat (Prameswari, 2023).

Secara historis, MT merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaannya dapat ditelusuri hingga zaman Rasulullah SAW, meskipun pada masa itu belum menggunakan nama "Majelis Taklim" (Kemenag RI, 2012). Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, MT telah menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan dan menyiarkan ajaran Islam kepada masyarakat.⁴ Perkembangannya di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan setelah peristiwa G.30 S/PKI, dan terus tumbuh hingga saat ini.⁶ Kemampuan Majelis Taklim untuk beradaptasi dan bahkan berkembang di berbagai konteks sosio-politik, termasuk periode pergolakan, menunjukkan adaptabilitas dan resiliensi historis yang luar biasa. Sifatnya yang non-formal dan fleksibel¹ kemungkinan besar berkontribusi pada ketahanan ini, sekaligus menjadi faktor pemungkin untuk mengisi kesenjangan pendidikan dan sosial ketika institusi pendidikan formal mengalami hambatan.

Dalam konteks politik elektoral di Indonesia, peran MT seringkali melampaui "khittahnya." Lembaga ini acapkali dijadikan sebagai wahana untuk sosialisasi para pihak yang berkontestasi dalam pemilihan, baik itu legislatif maupun pemilihan presiden, kepala daerah, bahkan kepala desa.¹⁸ Bahkan, MT kerap menjadi "kendaraan politik" yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menggaet massa dan meraup suara pada setiap kontestasi politik.¹⁰ Jangkauan dan pengaruhnya yang luas terhadap komunitas menjadikannya target yang menarik bagi aktor politik. Hal ini membuka kemungkinan instrumentalitas ruang keagamaan, di mana fungsi keagamaannya dapat dibayangi atau dimanfaatkan untuk tujuan politik, sekaligus sebagai indikasi adanya potensi pergeseran fungsi dari MT.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keterlibatan MT dalam proses politik elektoral di Indonesia. Analisis akan mencakup identifikasi bentuk-bentuk keterlibatan, mekanisme yang digunakan untuk memobilisasi dukungan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap fungsi tradisional Majelis Taklim dan kohesi sosial masyarakat.

Majelis Taklim Dan Pendidikan Politik

Secara bahasa kata Majelis Taklim diambil dari bahasa Arab yaitu kata majelis yang (isim makan) yang berasal dari kata jalasa, yajlisu, julusan yang berarti tempat duduk, tempat, atau rapat. Sedangkan kata ta'lim (isim masdar) yang berasal dari kata 'alima, ya'lamu, ilman, yang berarti mengetahui sesuatu, ilmu, dan arti ta'lim adalah pengajaran atau melatih. Jadi secara keseluruhan kata Majelis Taklim berarti tempat (wadah) yang di dalamnya terdapat proses belajar-mengajar para jamaah atau anggotanya (Kemenag RI, 2014). Sementara PMA No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim mendefinisikan Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam non formal sebagai sarana dakwah Islam.

Seiring berkembangnya waktu Majelis Taklim akhirnya tidak hanya sebatas sebagai tempat pengajian atau pengajaran agama saja akan tetapi sudah menjelma lebih maju lagi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki sistem manajemen dan kurikulum sendiri dalam mengadakan berbagai kegiatan pengajian dan pengajaran keagamaan Islam. Dalam praktiknya, MT tidak terikat oleh waktu dan tempat, bersifat terbuka tanpa memandang usia, kelamin, suku dan strata sosial. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan MT pun bisa di pagi, siang, sore atau malam hari. Tempatnya pun fleksibel bisa dilakukan ruang tertutup maupun ruang terbuka, bisa di rumah, mushola, masjid, sekolah, aula, atau gedung lainnya. Setiap MT memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda tanpa ada batasan dan aturan dari sisi jumlahnya. Jenis MT pun bervariasi, ada khusus untuk ibu-ibu, khusus bapak-bapak, khusus remaja dan ada juga yang beranggotakan pria dan wanita.

Secara fungsi Majelis Taklim memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai lembaga dakwah, sebagai Lembaga Pendidikan Islam non formal serta sebagai sarana kontak sosial dan ajang silaturahmi. Inilah yang menjadikan Majelis Taklim dapat terus eksis bertahan sampai sekarang dikarenakan fleksibilitas yang dimilikinya. Sebagai Lembaga dakwah Majelis Taklim berusaha untuk menanamkan kebajikan dan nilai keagamaan yang mencakup didalamnya peningkatan akhlak al karimah, menanamkan nilai-nilai kebajikan dan moralitas diri dalam berinteraksi sebagai makhluk Tuhan. Berdakwah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, dalam berdakwah acapkali mendapat tantangan dan rintangan yang harus disikapi secara bijak. Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling sempurna sekalipun acapkali mendapat rintangan dan cobaan. Oleh karenanya dalam berdakwah seorang ustad butuh suatu cara dan media yang baik agar proses dakwah yang dilakukan dan pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran, berjalan dengan baik serta dapat diterima semua kalangan.

Sebagai lembaga pendidikan pada akar rumput, MT sering bersentuhan dengan beberapa kepentingan seperti, pertama, kepentingan pemerintah. Dalam konteks ini, MT kerap menjadi ranah sosialisasi program-program dan kebijakan pemerintah. Kedua, kepentingan kelompok atau golongan. Kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh MT menjadi ajang sosialisasi visi dan misi suatu kelompok tertentu seperti parpol, ormas dan lain sebagainya. Ketiga, kepentingan Individu. Tidak jarang, MT didirikan dengan tujuan kepentingan atau target pribadi tertentu. Keempat, kepentingan pendidikan. Seiring dengan perkembangan pluralisme pemahaman keagamaan, maka tidak jarang MT didirikan dengan maksud untuk menanamkan pemahaman tertentu kepada para jamaahnya (Dahlan., 2018).

Dalam bidang politik, MT kerap menjadi "objek" dari partai politik maupun aktor politik yang mempunyai kepentingan politik tertentu. Irisan dengan kepentingan politik ini bersifat "mutualisme", dimana partai atau aktor politik mendapatkan dukungan dari MT, sementara MT memperoleh "benefit" berupa materi atau fasilitas. Akan tetapi dalam jangka panjang, interaksi dengan kepentingan politik dapat menjadi sarana bagi pendidikan politik bagi para jamaah MT, sehingga mereka dapat memahami dinamika politik yang terjadi dan meresponnya secara dewasa dan cerdas. Dalam konteks ini, MT berperan dalam pemberdayaan politik anggotanya. Peran yang dijalankannya bukanlah karna lembaga

dakwah ini telah bermain politik praktis, tetapi lebih pada ikhtiar untuk memberikan kesadaran, pengetahuan, dan wawasan politik (Muhsin, 2009).

Politik Elektoral dan Kepentingan Praktis

Dalam konteks politik elektoral, Menurut Firmanzah perilaku pemilih secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konstantan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konstantan bersangkutan (Firmanzah, 2008). Sedangkan menurut Amalia (2014) pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi atas cara kontestan (partai politik, calon pemimpin) dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan.

Tingkat efektivitas solusi yang ditawarkan kontestan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi pemilih akan berpengaruh terhadap probabilitasnya untuk dipilih. Karenanya, alternatif solusi yang disampaikan harus berbasis pada argumentasi yang kuat dan disokong oleh data dan informasi yang valid. Pemilih, dalam konteks ini, dapat berupa, pertama, masyarakat umum yang bukan merupakan partisan atau terafiliasi dengan kelompok atau ideologi politik tertentu. Kedua, konstituen yaitu kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Kelompok masyarakat ini adalah para pendukung atau konstituen suatu partai politik dilingkungan internal dan konstituen pendukung pesaing-pesaing di lingkungan eksternal (Firmanzah, 2008).

Menurut Nursal (2004) ada beberapa pendekatan dalam pilihan politik untuk melihat perilaku pemilih, yakni sebagai berikut :

Pendekatan Sosiologis.

Menurut pendekatan ini, determinasi perilaku memilih seseorang yang dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, agama, dan lingkungan sekitar. Preferensi pilihan pemilih lebih mengutamakan ikatan sosial dalam menentukan perilaku memilihnya. Ikatan sosial tersebut berupa, adanya persamaan dari segi etnik, ras, agama, keluarga, pertemanan yang dialami individu secara historis.

Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak calon pemilih masih berusia dini, di mana ia telah menerima “pengaruh” politik dari orang tuanya, baik melalui komunikasi langsung maupun pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih kuat ketika terinternalisasi melalui pengaruh berbagai kelompok acuan seperti kelompok pekerjaan, kelompok pengajian dan sebagainya.

Pendekatan Rasional

Pendekatan ini melihat perilaku memilih berdasarkan atas pemikiran yang rasional, memilih berdasarkan pada asas manfaat untuk dirinya, dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dalam sudut pandang ekonomi politik, pemilih rasional, tidak akan ikut memilih jika lebih menguntungkan bagi mereka karena mereka akan menikmati hasil yang sama dengan mereka yang memilih tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk ikut memilih. Selain itu, pemilih lebih menentukan pilihannya secara prospektif, yaitu dengan melihat kinerja dari pemerintah yang berkuasa yang sudah berakhir mampu memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan pemerintahan sehingga akan dipilih kembali pada pemilu berikutnya sebaliknya apabila pemerintah tidak memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan pemerintahan maka akan ditinggalkan dan tidak akan dipilih lagi pada pemilu selanjutnya (Apaut, Bainus, dan Kartini, 2015).

Selain ketiga pendekatan di atas, faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam politik elektoral adalah orientasi pemilih. Menurut Firmanzah (2008), terdapat dua aspek dapat dijadikan

ukuran mengenai cara memilih dalam menilai kedekatannya dengan partai politik atau seorang konstenstan, yaitu:

Kesamaan mengenai cara pemecah masalah (policy problem solving)

Pemilih, dalam hal ini, kecenderungan pemilih akan sangat dipengaruhi oleh cara yang ditawarkan oleh kontestan (partai politik maupun calon pemimpin) dalam mengatasi sebuah permasalahan. Pemilih memiliki kecenderungan untuk tidak memilih partai politik atau calon pemimpin yang kurang mampu menawarkan progam kerja dan hanya mengandalkan spekulasi serta jargon-jargon politik.

Kesamaan dalam paham serta nilai dasar ideologi (ideology)

Struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai apa dan kandidat seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan suara mereka. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai atau kandidat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka daripada partai politik atau kandidat yang memiliki ideologi yang berbeda. Terdapat beberapa hal yang digunakan partai politik atau kandidat dalam hal ini. Pertama, partai politik atau kandidat berusaha menarik masyarakat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka. Kedua, partai politik atau kandidat berusaha memperkenalkan dan meyakinkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesamaan ideologi dengan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Firmanzah, terdapat empat kategori pemilih dalam suatu kontestasi pemilih:

Pemilih Rasional

Pemilih tipe ini memiliki orientasi yang cukup tinggi terhadap policy-Problem Solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan pada kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu berdasarkan rekam jejak calon kandidat, karakteristik parpol/kandidat, dan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih Kritis

Pada pemilih kritis ini, proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu: pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau sang kontestan pemilu, kemana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik terlebih dahulu dengan program kerja yang ditawarkan oleh partai ataupun kontestan. Kemudian mencoba mamahami nilai-nilai dan faham yang mendasari pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisa kaitan antara sistem partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat.

Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak mengutamakan kebijakan partai politik atau seorang kontestan, sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial, budaya, popularitas, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pilkada. Kebijakan seperti ini yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas yang kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah untuk dimobilisasi dari masa sosialisasi calon kontestan sampai dengan kampanye berlangsung, dan pemilih jenis ini juga memiliki

loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

Pemilih Skeptis

Jenis pemilih ini sangat kecil orientasi mereka pada ideologi maupun kebijakan partai/kandidat. Mereka tidak memperhatikan pada platform parpol, malas turut berpartisipasi dalam prosesi politik, dengan kata lain (sudah tidak percaya lagi dengan pemimpin). pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, orientasi pada pemilih jenis ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan sesuatu hal yang penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, itu biasanya karena mereka melakukannya secara acak atau random. Dengan keyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya ya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kondisi daerah/negara.

Dalam konteks politik elektoral, MT tidak luput dari "tarik menarik" dengan kepentingan politik praktis. Beberapa partai politik bahkan dengan sengaja membentuk kadernya melalui kegiatan serupa namun dengan nama berbeda. Misalnya, Partai Golkar mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), yang merupakan ormas Islam yang berinspirasi ke Partai Golkar dan didirikan pada tanggal 24 Mei 1978, atau Majelis Taklim Khadijah yang dibentuk oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertepatan dengan hari lahir partai tersebut, yakni 5 Januari 2022. Afiliasi politik tersebut juga dapat terlacak dalam struktur organisasi MT, di mana tokoh politik tertentu diangkat menjadi penasihat atau pembina.

Adapun MT yang tidak terafiliasi dengan kontestan politik tertentu (perorangan atau partai politik) kerap menjadi tempat sosialisasi atau kampanye terselubung bagi kontestan politik. Apakah sosialisasi tersebut berpengaruh pada preferensi anggota MT dalam memilih, sangat bergantung pada seberapa tinggi kepercayaan anggota MT terhadap "tawaran" yang dijanjikan oleh kontestan kepada MT tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, tidak dapat dipungkiri bahwa agama adalah bagian dari identitas yang seringkali menjadi alat utama dalam menjalankan politik identitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Huntington, bahwa identitas primordial memang menjadi faktor utama dalam gesekan-gesekan antar peradaban di Indonesia, sebuah negara yang menempatkan urusan agama sebagai bagian dari urusan negara, Agama seringkali menjadi sumber kekuatan dalam melakukan tekanan-tekanan terhadap kelompok berbeda.

KESIMPULAN

Keterlibatan MT dalam politik elektoral dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, MT tersebut dibentuk atau terafiliasi dengan kontestan politik tertentu, baik secara individual maupun lembaga (partai politik). Sebagai pemilih, anggota MT memiliki kecenderungan untuk memilih partai atau kandidat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka daripada partai politik atau kandidat yang memiliki ideologi yang berbeda. Pada konteks ini, program atau kebijakan yang ditawarkan tidak menjadi preferensi utama dalam memilih sebuah partai politik atau kontestan pilkada, tetapi lebih kepada kedekatan atau kesamaan sosial, budaya, dan agama.

Adapun faktor kedua adalah sejauh mana suatu program atau "janji kampanye" yang ditawarkan dianggap realistis bagi anggota MT untuk menjawab isu-isu kekinian. Dalam konteks ini, MT pada umumnya tidak terafiliasi dengan kontestan politik tertentu. Para kandidat yang berkompetisi umumnya melakukan "kampanye terselubung" dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan MT. Pilihan politik anggota MT pada umumnya dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya, kerabat dekat, pengasuh majelis taklim dan juga tim sukses dari kandidat calon.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah adanya irisan kepentingan yang bersifat "mutualisme", dimana partai atau aktor politik mendapatkan dukungan dari MT, sementara MT memperoleh "benefit" berupa materi atau fasilitas. Preferensi pilihan, dengan demikian, dipengaruhi

oleh seberapa besar keuntungan yang diperoleh anggota MT atau MT secara kelembagaan dari para kontestan yang berkompetisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo dan Muhamad Agus Yusoff, 2009, "Kajian Politik dan Masalah Pembangunan," Jurnal Politik Volume V No I,
- Amalia, Ghazaly Nora, 2014, Ilmu Komunikasi Politik (Yogyakarta: CV. Andi Offset)
- Nursal, Adman. 2004. Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Apaut, Yohana, Arry Bainus, dan Dede Sri Kartini, 2018, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015," Jurnal TAPIS Vol. 14 No.02
- Dahlan, Zaini, 2018, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta' Lim," Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. 1, no. 1.
- Firmanzah, 2008, Marketing Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Kementerian Agama RI, 2012, Pedoman Majelis Taklim (Jakarta, Kementerian Agama RI)
- MK, Muhsin, 2009, Manajemen Ta'lim:Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya (Jakarta: Pustaka Intermedia)
- Prameswari, Kirana Meidy, 2023, Majelis Taklim dan Politik Elektoral (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Skripsi)
- Ridwan, Iwan, 2020, "Sejarah dan Kontribusi Majelis Ta'lim dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia", Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ), Volume 6, Nomor 1
- Syafar, Muhammad, 2020, "Pemberdayaan Komunitas Majelis Taklim Di Kelurahan Banten Kecamatan Kesemen Kota Serang". Jurnal: Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten.